

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal. Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Sistem akuntansi pada organisasi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD selaku entitas akuntansi akan melaksanakan sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap atau barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, sehingga

menghasilkan laporan keuangan. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2007 SKPD di setiap kabupaten mulai berupaya mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Reformasi pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian terintegrasi dengan pengelolaan keuangan negara merupakan hal yang harus diterima dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pengembangan sistem akuntansi memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi. Suatu studi yang menyelidiki bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok, serta struktur mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dalam organisasi disebut dengan perilaku organisasi. Perilaku mengacu pada apa yang ingin dilakukan oleh orang dalam organisasi, bagaimana orang-orang tersebut dibentuk, dan apa sikap mereka Lubis, (2010) dalam Purwasih, dkk (2017 : 179 – 193).

Pemerintah daerah selalu berupaya untuk mengintensifkan langkah-langkah pengelolaan keuangan daerah dengan baik guna mencapai *Good Government Governance*. Langkah yang dilakukan pemerintah diberbagai

Peraturan dan Undang-Undang adalah dengan terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam mengelola keuangan daerah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintahan atas keuangan yang dikelolanya adalah dalam bentuk penyampaian laporan keuangan.

Terdapat sebuah kasus korupsi dana Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) di pemerintah kota Surabaya tahun 2016 (Agus Setiawan Tjong). Dilansir *Liputan6.com, Surabaya* majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi “Mengadili, menghukum terdakwa Agus Setiawan Tjong dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp 20 juta, subsidi 6 bulan kurungan, Majelis hakim juga menjatuhkan pidana uang pengganti Rp 4,9 M”.

Berdasarkan fenomena diatas, penelitian bertujuan untuk menguji Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Penelitian ini akan menguji pengaruh faktor perilaku organisasional, konflik kognitif dan afektif dalam meningkatkan implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Kecamatan Surabaya Timur wilayah Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo, Tambaksari, Mulyorejo, Rungkut, Tenggiling Mejoyo.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi Wahyundaru, (2001) dalam Kayati (2016). Pernyataan Kayati tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa diperlukan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baru untuk menggantikan sistem keuangan lama yang selama ini digunakan oleh

Pemerintah Daerah yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang telah diterapkan sejak 1981. Sistem MAKUDA tersebut sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan saat ini.

Penelitian tentang implementasi inovasi pengukuran kinerja pemerintahan dilakukan oleh Cavalluzzo dan Ittner (2004) dalam Astuti 2017 menunjukkan bahwa beberapa faktor teknik dan faktor organisasional meliputi komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan, pelatihan dan mandat dari legislatif berhubungan dengan implementasi inovasi sistem pengukuran. Chenhall (2004) dalam Astuti 2017 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor perilaku selama implementasi meningkatkan kegunaan sistem *ABCM (activity based costing manajemen)* pada perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian sistem baru, perlu dipertimbangkan faktor-faktor perilaku seperti komitmen dari sumber daya yang terlibat, dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan.

Pemerintah daerah Surabaya bagian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mengimplementasikan penggunaan sistem informasi akuntansi terintegrasi dan perubahan tersebut menjadi sistem online membuat sistem pelaporan dan manajemen keuangan pemerintah Kecamatan Surabaya Timur bisa menjadi lebih cepat, sehingga ketika pimpinan ingin melihat laporan dapat langsung diakses dan memberikan informasi yang akurat. Namun dalam mengoperasikan sistem akuntansi keuangan daerah masih banyak pegawai pemerintah yang belum memahami cara mengoperasikan sistem tersebut, maka dari itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset perlu melakukan bimbingan teknis dimana para

pegawai diberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem tersebut.

Kehadiran sistem teknologi informasi telah banyak mengubah organisasi dan saat ini organisasi mulai bergantung pada sistem teknologi informasi, suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi, walaupun pimpinan yang mengambil keputusan untuk mengadopsi suatu sistem teknologi informasi, tetapi keberhasilan penggunaan teknologi tersebut tergantung dari penerima dan penggunaan oleh individu-individu. Dengan demikian, manfaat dan dampak langsung dari sistem teknologi informasi ini adalah terhadap individual pemakai dan kemudian akan meningkatkan produktivitas organisasi.

Chenhall (2004) dalam Purwasih, dkk (2017) mengemukakan bahwa faktor organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan. Setelah membaca uraian diatas, penelitian ini akan menganalisis pengaruh faktor perilaku terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007, Atas Perubahan Permendagri No.13 Tahun 2006, dimana sistem tersebut mulai diimplementasikan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis faktor perilaku organisasional dalam meningkatkan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di Kecamatan Surabaya Timur.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perilaku organisasi pelatihan berpengaruh terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ?
2. Apakah perilaku organisasi kejelasan tujuan berpengaruh terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah?
3. Apakah perilaku organisasi dukungan atasan berpengaruh terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Maka tujuan yang dicapai adalah:

1. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh perilaku organisasi pelatihan terhadap implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
2. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh perilaku organisasi kejelasan tujuan terhadap implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
3. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh perilaku organisasi dukungan atasan terhadap implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di Universitas. Hasil

penelitian ini sebagai pembelajaran dan dapat menambah wawasan penulis mengenai pelaksanaan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi instansi terutama tentang akuntansi keperilakuan dan dapat menjadi bahan masukan mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang saat itu ditetapkan.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi fakultas dalam mempertimbangkan pentingnya muatan mata kuliah Akuntansi Keperilakuan dan Akuntansi Sektor Publik dalam Program Studi Akuntansi.